

PERANAN SJAM KAMARUZZAMAN DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER TAHUN 1965

Oleh:
Runalan Soedarmo ¹
Rini Sri Muslimin ²

ABSTRAK

Keterlibatan Sjam Kamaruzzaman dalam Gerakan 30 september 1965, adalah dari latar belakang pendidikannya yang berpindah-pindah tempat hingga akhirnya ia ke Yogyakarta. Disanalah terlihat Keterlibatan Sjam didalam politik berhaluan kiri (komunis) dimulaai sejak ia ikut kelompok Pathuk dan aktif dalam organisasi buruh dan petani. Kemudian pada tahun 1947 ia bertemu dengan Aidit dan menjadi asisten pribadinya hingga akhirnya resmi menjadi anggota dari partai PKI. Kepercayaan Aidit pada Sjam sangat besar dan kemudian dijadikannya Sjam sebagai ketua Biro Khusus suatu organisasi ilegal dibawah pimpinan Aidit langsung. Adanya Biro Khusus adalah untuk melakukan Infiltrasi terhadap ABRI sebagai usaha strategi untuk melakukan kudeta dengan kekuatan militer. Meletusnya Gerakan 30 September tahun 1965 telah membuat peranan Sjam terlihat semakin jelas dengan ditunjuknya ia sebaga pimpinan pelaksana Gerakan, alasannya karena ia tidak begitu dikenal dikalangan luas dan merupakan ketua Biro Khusus yang mengetahui informasi mengenai perwira-perwira tinggi ABRI. Akhir perjalanan Sjam dalam kariernya setelah kegagalan Gerakan 30 September berakhir di Mahmilub dan memberikan kesaksian-kesaksian mengenai kudeta terseut. Hingga dari kesaksiannya menimbulkan pendapat bahwa ia seorang Agen Ganda. Manfaat penelitian ini adalah dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran sejarah disekolah serta pengembangan nilai-nilai perjuangan bagsa dan implikasinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pribadi peneliti, khususnya bagi kepentingan pembelajaran di sekolah.

Kata Kunci: *Sjam Kamaruzzaman dan G.30. S*

ABSTRACT

Sjam Kamaruzzaman involvement in the thirtieth of September movement 1965 was in education background. He move from one place to another place till found Yogyakarta. The involvement of Sjam Kamaruzzaman in Communist Party started when he joined Pathuk group and he took part actively in farmer and lakor organization. In 1947 h7 he met Aidit and met Aidit and became Aidit's assistant. Then, he became Aidit's assistant. Then, he became communist party member, Aidit b became communist party member, Aidit belliveived sja sja sjam vem verry much. Then, Aidit took Sjam out as trry much. Then, Aidit took Sjam out as the leader of Chusus Bureau (an illegal organization directed by Aidit) Chusus Bureau did some infiltration to ward Indonesian Army (ABRI) as strategic coup attempt by means of milirattempt by means of military force. Becaming the leader of the thirtieth of september movement 1965 made the role of Sjam appeared. The reason are Sjam was unknow people before. Beside, Sjam knew more information about the leader of millitary officer. Sjam career ender after the failure of the thirtieth of september movement in Mahmilub movement, Sjam told some avidence about the coup attempt. The benefits of this research is expected to be able to be used as the literature source for studying history subject. Besides, it expected to be able to give contribution to arrise students awreness toward the nation fighter. The last, this research is expected to be able to improve the writer's knowledge. Aspecially, in teaching and learning process.

Kata Kunci: *Sjam Kamaruzzaman dan G.30. S*

PENDAHULUAN

Geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia. Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Meski untuk sementara waktu diacuhkan, kondisi geografis suatu negara sangat menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Robert Kaplan menuturkan bahwa geografi secara luas akan menjadi determinan yang mempengaruhi berbagai peristiwa lebih dari pada yang pernah terjadi sebelumnya.

Dari segi politik, Indonesia pernah mengalami masa suram yaitu era pemberontakan yang terkenal dengan gerakan 30 September atau yang disingkat G 30 S kejadian ini didalangi oleh PKI meskipun ada yang menyebutkan dalang sesungguhnya bukanlah PKI, Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar diseluruh dunia. Di luar Tiongkok (China) dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3.5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan pergerakan sarjanaya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Menurut Moedjanto yang dikutip oleh Amanah (2008: 10)

Pada bulan juli 1959 parlemen dibubarkan dan sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden- sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat kekuasaan melalui angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan komunis yang dinamakan NASAKOM. (Marwati & Nugroho, 1993: 311).

Ajaran NASAKOM (nasionalis, Agama dan komunis) ciptaan sukarno ini menempatkan

PKI sebagai unsur penting yang sah dalam pergerakan Nasional dan dalam konstalasi politik Indonesia sehingga hal tersebut dapat menguntungkan bagi PKI. Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum Burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik. (Marwati & Nugroho, 1993: 323-324).

Gerakan 30 September merupakan pemberontakan yang paling besar yang pernah terjadi di negara Indonesia, hal ini memberikan dampak yang sangat besar bagi rakyat Indonesia pada masa lalu dan sekarang. Kejadian ini masih menyimpan rahasia yang mengandung kontroversi yang mendalam bahkan ada yang menyebutkan Syam Kamaruzzaman adalah dalang dibalik layar. Peranan syam kamaruzzaman dalam gerakan 30 september ini juga disebutkan telah disetir oleh suatu organisasi atau seseorang tokoh dari Indonesia yang mempunyai kepentingan masing masing. Sebut saja Soeharto dan kawan-kawan yang telah lama mengenal syam sejak awal perang kemerdekaan tahu 1945, pada peristiwa pathuk 3 juli 1946 syam dan pemuda pathuk membantu soeharto. Penjelasan dari beberapa sumber disebutkan bahwa syam adalah perwira intel berpangkat Lettu di Batalion 10 Yogyakarta yang saat itu dikomandani oleh letkol Soeharto. Pembentukan BC (biro khusus) yang dibentuk oleh D.N. Aidit secara langsung diketuai oleh Syam Kamaruzzaman adalah upaya untuk bentukan sayap militer PKI, namun setiap laporan dari BC tidak pernah dilaporkan kembali kepada Politbiro. Pembentukan BC ini diharapkan dapat mewujudkan revolusi dan mewujudkan impian masyarakat tanpa kelas untuk itu tugas dari BC ini adalah melakukan penetrasi ke kalangan ABRI. Pihak Barat, salah satu alasan pihak barat memasukan syam kedalam PKI adalah untuk mencegah Indonesia menjadi “negara komunis” karena kekhawatiran pihak barat yang menganggap letak strategis Indonesia di Asia Tenggara akan memberikan pengaruh besar terhadap negara-negara lain di Asia Tenggara yang nantinya akan menjadi negara komunis. (Bastian, 2013: 15)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode Sejarah atau metode historis. Metode ini mengandung empat langkah penting seperti yang diungkapkan oleh (Ismaun, 1992: 125-131) sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahap ini merupakan langkah awal bagi penulis dalam proses mencari dan mengumpulkan bahan-bahan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sasaran untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah misalnya penulis mendatangi perpustakaan umum, dan meminjam pada teman seprofesi yang mengajar sejarah. Disamping itu juga bisa dari arsip-arsip yang bersifat lokal, nasional, dan bahkan internasional.

2. Kritik

Kritik sejarah adalah penilaian secara kritis terhadap data dan fakta sejarah yang ada. Data dan fakta sejarah yang telah diproses melalui kritik sejarah ini disebut bukti sejarah. Bukti sejarah adalah kumpulan fakta-fakta dan informasi yang sudah divalidasi, yang dipandang terpercaya sebagai dasar yang baik untuk menguji dan menginterpretasi suatu permasalahan.

Pada tahap ini penulis mengkaji keabsahan sumber yang sudah dikumpulkan. Pengkajian terhadap sumber misalnya penulis lakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, dan kesesuaian dengan topik yang telah ditentukan. Kritik sumber ini dimaksudkan untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam keabsahannya. Dalam pelaksanaannya, kritik ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern dimaksudkan untuk mengkaji sumber-sumber yang sudah dikumpulkan, karena seringkali ada dokumen-dokumen yang dipalsukan. Kritik ekstern dilakukan dengan menyelidiki bahan yang digunakan seperti kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa dan jenis huruf.

Kritik intern dimaksudkan untuk menilai kredibilitas dari sumber yang didapatkan penulis. Dengan kata lain kritik intern dimaksudkan untuk menilai suatu sumber dari sisi isi, apakah isinya dapat dipercaya atau tidak.

3. Interpretasi

Pada tahap ini, penulis mengadakan interpretasi (penafsiran) dan analisis terhadap data dan data yang terkumpul. Prosedur ini dilakukan dengan mencari data dan fakta, menghubungkan berbagai data dan fakta serta membuat tafsirannya.

Penafsiran terhadap data-data yang sudah diperoleh harus dilakukan secara jujur dan penuh ketelitian karena jika tidak, penafsiran yang dilakukan penulis akan menimbulkan subjektivitas dalam sejarah. Dalam penafsiran data-data sejarah diperlukan kemampuan dalam membaca sumber seperti makna bahasa yang terdapat dalam sumber tersebut.

4. Historiografi

Setelah melakukan tahap-tahap dalam metode sejarah yaitu mengumpulkan data, kritik data dan interpretasi maka sebagai tahap terakhir dari metode sejarah adalah penulisan sejarah.

Dalam penulisan sejarah, penulis harus memperhatikan aspek kronologi. Dari cara penyampaiannya, penulisan sejarah dibedakan menjadi dua yaitu penulisan sejarah naratif dan penulisan sejarah strukturalis. Sejarah naratif yaitu penulisan sejarah dengan pendekatan sejarah sebagai rekaman peristiwa yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penulisan sejarah strukturalis atau sejarah social lebih menekankan pada masalah bagaimana masyarakat mempertahankan dirinya dan mengatur hubungan dengan sesamanya serta bagaimana masyarakat memecahkan masalah yang dihadapinya.

Adapun teknik penelitiannya melalui kajian pustaka atau studi literatur, dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan, membaca, menelaah, menyeleksi, dan menuangkannya kedalam karya ilmiah.

PEMBAHASAN

Keterlibatan dan Strategi Sjam Kamaruzzaman Dalam Usaha Pembentukan Gerakan 30 September Tahun 1965

Perkenalan Sjam dengan Aidit pada tahun 1949 yang berawal dari dibuatkannya skenario "Penjemputan Aidit" dari Vietnam menuju Jakarta dalam usaha persembunyiannya ini dimaksudkan agar dapat mengelabui para

petugas dari pencarian orang-orang yang terlibat dalam peristiwa PKI Madiun 1948. Setelah perkenalan itu Sjam dan Aidit menjadi lebih dekat bahkan sejak Sjam keluar dari kepengurusannya dari SOBSI ia dijadikan asisten pribadi oleh D.N. Aidit. kemudian tahun 1960 Sjam resmi menjadi anggota Departemen Organisasi PKI yang tugasnya melakukan pembinaan secara rahasia kepada kalangan militer karena hasil dari Departemen Organisasi PKI ini tidak optimal maka dibentuklah Biro Chusus yang diketuai oleh Sjam Kamaruzzaman dan dibantu oleh 4 orang anggota lainnya. (Seri Buku Tempo, 2010: 22)

Tugas dari Biro Chusus ini adalah mengurus, memelihara, dan merekrut orang-orang dari militer yang bersimpati kepada PKI secara rahasia (ilegal), Biro Chusus memiliki caranya tersendiri dalam melaksanakan tugasnya "Membina" orang-orang militer. Dengan adanya Tugas Biro Chusus yang demikian rahasianya maka pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis orang-orang dari ABRI yang bersimpati kepada PKI, sebenarnya untuk Sjam mengenal orang-orang dari kalangan militer tidak begitu sulit karena keterlibatannya dulu dalam kelompok pemuda Pathuk, teman-teman pathuk yang masuk tentara inilah yang kemudian dijadikan Sjam sebagai bagian dari jaringan rahasianya.

Setelah mendapatkan data orang-orang militer yang masuk kedalam simpatisan PKI dilakukanlah pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai politik baik itu secara teori maupun praktek. Ketika merasa cukup memberikan peningkatan politik maka anggota ABRI ini bisa dianggap sebagai anggota partai yang mampu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, seperti Brigjen Supardjo, Kolonel Latief, Mayor Suyono, Letkol Untung, Laksamana (Marsekal) Omar Dhani, Kolonel Laut Sunardi, Letkol Heru Atmdjo, dan sebagainya. Jika anggota ABRI belum bisa dianggap sebagai anggota partai maka diklasifikasikan sebagai Simpatisan Partai yang tugasnya hanya mempelajari politik dan pengetahuan mengenai kepartaian, cara yang dilakukan biasanya adalah dengan bertukar pikiran yang pembahasannya sampai mengenai Marxisme-Leninisme. (Aco, 2007: 15)

Selanjutnya Biro Chusus akan memperluas rasa perbedaan antara atasan dan bawahan dan semakin mempertajam hal tersebut dengan membedakan kondisi sosial dan

ekonominya. Tidak dapat dipungkiri perbedaan antara atasan dan bawahan memang selalu ada sehingga Biro Chusus selalu memanfaatkan hal ini kepada anggota ABRI yang baru masuk ke partai dan memperluas hal tersebut sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dari anggota ABRI bahwa mereka adalah bawahan dari PKI, sebenarnya dapat dipahami hal ini dilakukan oleh Biro Chusus sebagai upaya untuk melemahkan anggota ABRI yang baru masuk tersebut karena ketika hal itu terjadi maka akan sangat mudah bagi PKI dan Biro Chusus memberikan perintah kepada anggota ABRI yang baru masuk partai itu. Kemudian jika hal itu terjadi maka dalam tubuh ABRI yang telah terdapat anggota-anggota PKI dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan dalam operasi-operasi perjuangan partai, misalnya, dijadikan saluran untuk berhubungan dengan anggota militer lain dalam mencari sumber informasi mengenai aktivitas ABRI.

Biro Chusus sebenarnya dibentuk tidak hanya ditingkat pusat melainkan sampai ke tingkat daerah. Misalnya, daerah Yogyakarta dibantu oleh Wiryomartono dan untuk daerah Solo oleh Djojopratedjo. Meskipun Biro Chusus bersifat rahasia dan perekrutan kadernya sedikit tetapi Sebagai ketua Biro Chusus Sjam ternyata dapat melakukan kontak-kontak dengan cabang di daerah-daerah dan kenyataannya ia dapat melakukan kontak dengan jelas terlihat pada angka-angka dibawah ini:

250 perwira di Jawa Tengah,
200 di Jawa Timur,
80-100 di Jawa Barat,
40-50 di Jakarta,
30-40 di Sumatera Utara,
30 di Sumatera Barat dan
30 di Bali. (Bastian, 2013: 14)

Dalam mencari anggota ABRI yang akan direkrut, Biro Chusus lebih mementingkan anggota ABRI yang dahulunya sempat ikut serta atau setidaknya memiliki rasa simpati pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948, anggota muda ABRI yang masuk ABRI setelah tahun 1950 alasannya diharapkan mereka tidak punya sikap anti-komunis karena tidak terlibat dan bahkan mengalami penumpasan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, tidak terlupakan juga Biro Chusus merekrut mereka anggota ABRI dari perwira-perwira yang sakit hati dan tidak

meyukai korupsi serta gaya hidup mewah dikalangan beberapa perwira ABRI.

Anggota ABRI yang telah menjadi pengikut PKI tidak dimasukan secara resmi kedalam partai bahkan kenggotaannya dirahasiakan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam melakukan pembinaan pada anggota ABRI cara Biro Chusus adalah lewat kenalan kerabat. Tujuan utama daripada masuknya PKI kedalam tubuh ABRI melalui Biro Chusus ini adalah untuk menyusun kekuatan PKI dalam ABRI sehingga dapat mengubah perimbangan antara PKI dan ABRI. hal ini didasarkan karena D.N. Aidit terinspirasi dari perkataan Mao Tse Tung bahwa “kekuasaan lahir dari ujung bedil”, Aidit sadar akan pentingnya suatu kekuatan militer dalam pergerakan PKI untuk mempermudah jalannya menuju tujuannya menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, Aidit yakin dengan teori yang dikemukakannya bahwa dengan 30% kekuatan militer (tentara) maka PKI dapat melakukan suatu kudeta.

Perlu diketahui bahwa penyusupan PKI melalui Biro Chusus yang dipimpin Sjam ini tidak hanya melibatkan TNI-AD saja melainkan meliputi jajaran angkatan bersenjata Republik Indonesia yang lainnya seperti TNI-AL, TNI-AU dan bahkan sampai kepada POLRI. Penyusupan kedalam TNI-AD jelas paling penting dilakukan selain karena kekuatan militer terbesar dianggap berada dikalangan TNI-AD juga karena TNI-AD dianggap musuh yang paling berat bagi PKI sehingga dijadikan sasaran *infiltrasi* utama. Persaingan antara PKI dan TNI-AD terlihat Sejak diumumkannya kepemimpinan Soekarno dengan ‘Demokrasi Terpimpinnya, kekuatan politik pada waktu itu berpusat di tangan Soekarno sebagai penguasa masa Demokrasi Terpimpin dengan TNI-AD dan PKI berada disampingnya.

Biro Chusus meningkatkan intensitas kerjanya kepada TNI-AD terutama kepada mereka yang disebut sebagai perwira-perwira berpikiran maju dan perhatian khusus diberikan kepada staf I, III, dan V dari masing-masing Kodam. Selain ketiga staf tersebut Biro Chusus juga mengincar perekrutan terhadap para komandan pasukan sebab seorang Komandan pasukan biasanya sangat berpengaruh terhadap anak buahnya bahkan pengaruh itu bisa sampai masuk kedalam kehidupan sehari-harinya. Peningkatan intensitas pembinaan terhadap TNI-AD agar secepatnya dapat dikembangkan dan dikonsolidasikan kekuatan sehingga dengan

cepat meruntuhkan kekuatan TNI-AD dari dalam. Pembuktian Biro Chusus dengan kerja intensifnya itu adalah masuknya perwira tinggi dan perwira menengah yang menjabat posisi penting antara lain Mayjen TNI Pranoto Reksosamodro, Brigjen TNI Soepardjo, Kolonel Inf. A. Latief, dan Letkol Inf. Untung.

Biro Chusus melanjutkan penyusupan ke jajaran angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya. TNI-AL adalah fokus selanjutnya meskipun dianggap Biro Chusus tidak begitu penting karena dianggap sibuk mengurus soal permasalahan intennya sendiri tetapi Biro Chusus tetap masuk dalam tubuh TNI-AL. Proses penyusupannya tidak berbeda jauh terhadap TNI-AD pada umumnya, penyusupan dimulai dengan pencarian oknum-oknum yang telah lama berada di tubuh TNI-AL sehingga mereka ditugaskan mencari sasaran yang kiranya bersimpati kepada PKI. Untuk pelaksanaan pembinaan di Markas Besar TNI-AL dilakukan oleh Pono dan berhasil membina Mayor KKO Pramuko Sudarmo. Disamping itu Biro Chusus daerah-daerah ikut diaktifkan dalam pembinaan TNI-AL terbukti dengan keberhasilan mereka membina Letkol Laut Ranu Sunardi melalui Rustomo, ketua Biro Chusus daerah Jawa Timur yang pada akhirnya dibina oleh Pono berhubung kepindahannya ke Jakarta, kemudian Biro Chusus daerah Riau juga berhasil membina Komodor Laut Soeradi. Penyusupan terhadap TNI-AL ini tidak sebaik di TNI-AD karena ternyata tidak dapat mempengaruhi pimpinan-pimpinan TNI-AL.

Penyusupan dalam tubuh TNI-AU, perwira TNI-AU yang berhasil dibina adalah Letkol Udara Heru Atmodjo dan Mayor Udara Sujono, berhasil mempengaruhi sikap-sikap Men/Pangau Laksdya Omar Dhani yang sudah mulai dihubungi Bono melalui Letkol Udara Heru Atmodjo. Keberhasilan pembinaan PKI ini menguntungkan PKI terlebih dapat mempengaruhi Men/Pangau Laksdya Omar Dhani. Sebelumnya pembinaan dalam TNI-AU telah dilakukan oleh Rachmat Kusumbroto, dia adalah seorang tokoh PKI yang bekerja di Kementerian Pertahanan Bagian Intelijen, dalam upayanya ia berhasil menghubungi Komodor Udara Siswandi yang waktu itu menjabat sebagai kepala Bagian Intelijen Markas Besar Angkatan Udara (MBAU) setahun kemudian ia berkenalan dengan Kolonel Udara Sudiono yang menggantikan Komodor Udara Siswandi sebagai Kepala Bagian Inteijen MBAU.

Penyusunan Biro Chusus juga dilakukan terhdap POLRI yang dilakukan langsung oleh tokoh Biro Chusus Central yaitu Pono dan Hamim. Pembinaan kedalam POLRI lebih baik karena berhasil mempengaruhi petinggi-petinggi POLRI seperti Brigjen Pol. S. Soetarto, yang menjabat sebagai wakil kepala Kepolisian Kutoarjo pada saat meletusnya perang kemerdekaan, dia juga berhasil menduduki jabatan penting dilingkungan kepolisian dan berhasil pula menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta berhasil menduduki jabatan Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI) pimpinan wakil PM (Waperdam) I Soebandrio. Brigjen Pol. S. Soetarto sejak semula sudah tertarik terhadap paham Marxisme-Leninisme yaitu sejak menjadi anggota Laskar Pesindo dan ketua Partai Buruh Kutoarjo yang kemudian berhasil mengembangkan hubungannya dengan tokoh-tokoh PKI seperti, D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Njoto. Tidak hanya sampai disitu Biro Chusus berhasil kembali mempengaruhi perwira-perwira kepolisian lainnya, antara lain Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) Imam Supoyo dan Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) Anwas Tanuami Djaja.

Dalam penyusunan Biro Chusus ke POLRI dibantu oleh Hardoyo, ia adalah orang PKI yang menyampaikan setiap info-info dari Aidit mengenai strategi PKI kepada Kombes Anwas Tanuami Djaja, akhirnya hasil dari kerja nyata dari Biro Chusus terhadap POLRI berhasil dengan saling curiga mencurgainya anggota POLRI, kecurigaan itu semakin parah ketika terdengar fitnah dan isu mengenai perpecahan dalam tubuh TNI dan POLRI.

Menurut Dr. Soebandrio (dalam Manafe, 2007: 17) ketika tampil di Musyawarah Besar Angkatan kepolisian di Aula Depak dia mengatakan “kalau Angkatan Kepolisian tidak bisa diperbaiki, maka baiklah kita tinggalkan, afgel met of zonder kepolisian, revolusi mesti jalan terus!”. Ucapan Soebandrio tersebut justru memperparah keadaan di Angkatan Kepolisian sehingga menimbulkan pro dan kontra atas apa yang disampaikan olehnya.

Sebenarnya perkataan yang dilontarkan oleh Waperdam Soebandrio yang dekat dengan PKI itu adalah salah satu tindakan untuk menyamakan tindakan-tindakan dengan PKI sejak adanya program tertib sipil yang berjanji membantu kepolisian. Namun ternyata, bukan hanya membuat saling kecurigaan dalam Angkatan Kepolisian semakin parah tetapi

membuat kepolisian tersudut karena ternyata PKI tidak mendukung dan membantu kepolisian melainkan memfitnah dan sengaja menikam POLRI dari belakang dengan mencap mereka sebagai kaki tangan tuan tanah dan alat imperialisme ketika mereka berhadapan dengan insiden penembakan para demonstran petani di Boyolali yang terpaksa dilakukan karena para demonstran tersebut menghina polisi.

Keberhasilan Biro Chusus dalam melakukam pembinaan pada sejumlah perwira-perwira ABRI sehingga menjadi pendukung dan bahkan menjadi anggota partai yang meskipun keanggotaannya dirahasiakan terhadap kalangan militer tidak terlepas dari banyaknya anggota ABRI yang dulunya simpatisan dan berhaluan Marxisme-leninisme. Keberhasilan Biro Chusus ini juga karena intensifnya mereka dalam mempengaruhi perwira-perwira ABRI sehingga tidak hanya mereka yang mendukung dan simpatisan terhadap Marxisme-Leninisme saja melainkan banyak dari mereka yang tidak begitu terjun dalam komunis ikut serta untuk mendukung PKI. Biro Chusus dapat melakukan taktik adu domba dengan baik dan dapat memecah belah ABRI sehingga tercapailah tujuan mereka untuk memperlemah ABRI yang memang prinsip kejuangannya menjaga konstitusi dan negara RI sehingga menjadi alat untuk pencapaian strategi perebutan kekuasaan.

Setelah melancarkan rencananya untuk mendapatkan kekuatan militer dengan masuk ketubuh ABRI, Biro Chusus juga melakukan strategi lain untuk melemahkan kalangan militer yang tetap tidak pro terhadap PKI dengan cara menyebarkan isu Dewan Jendral, sebelumnya PKI juga menyusup ke jajaran aparaturnegara dan ke dalam partai politik serta Organisasi Massa. Rencana yang dilakukan oleh PKI belum sampai ke isu mengenai Dewan Jendral melainkan gagasan ingin adanya pembentukan “Angkatan V” yang di sarankan oleh D.N Aidit. Angkatan kelima ini bertujuan untuk mempersenjatai para buruh dan petani sebagai persiapan kudeta dan atau perampasan kekuasaan dan menyaingi ABRI, diketahui gagasan dari Aidit mengenai Angkatan Kelima ini adalah usulan dari pihak RRC melalui tokoh militer Chen Yi yang sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Aidit. Gagasan Angkatan V ini juga berkaitan dengan tawaran PM Chou En Lai, berupa sumbangan 100 ribu pucuk senjata kepada Soekarno yang pada saat itu sedang berkunjung ke Shanghai untuk

mempersenjatai Angkatan V. (Aco Manafe, 2007: 34)

Gagasan V ini tentunya mendapatkan hasil pro dan kontra di dalam pemerintahan Soekarno, PKI yang terus menyerukan untuk dibentuknya Angkatan V mendapat simpati dari Soekarno dan juga dari luar ABRI seperti dari menteri penerangan Achadi. Sebelum meresmikan gagasan tersebut Soekarno tetap mementingkan pendapat dari ABRI tetapi petinggi-petinggi ABRI terkecuali Omar Dhani, tidak menyetujui gagasan tersebut karena mereka mengetahui jika hal tersebut terjadi maka akan berbahaya jika buruh dan tani dipersenjatai dan juga akan menambah beban rakyat serta meyulitkan ABRI untuk menghadapi PKI. Jenderal A.H. Nasution mencoba mengimbangi usul dan usaha PKI tersebut dengan membentuk Hansip, Resimen Mahasiswa dan Kesatuan-kesatuan Karyawan Perusahaan-perusahaan negara. Namun, karena Simpati Soekarno terhadap gagasan itu, D.N. Adit terus menyerukan gagasan itu meskipun pada akhirnya tidak dapat dibentuk secara resmi.

Tidak dibentuk secara resminya gagasan tentang Angkatan V tidak menghalangi PKI untuk tetap merealisasikan gagasan tersebut, diduga kuat bahwa secara diam-diam PKI tetap melaksanakan keinginannya dengan dibantu oleh oknum-oknum ABRI. Dengan melatih anggota pemuda rakyat dan gerwani. Hal ini diketahui setelah terjadinya pemberontakan 30 September tahun 1965.

Gagasan untuk dipersenjatainya buruh dan petani tidak mendapatkan pembentukan secara resmi karena tidak mendapat persetujuan TNI-AD. Selain itu pembinaan yang dilakukan Biro Khusus terhadap kalangan militer juga tidak dapat meraih orang-orang penting atau petinggi-petinggi yang berpengaruh di ABRI secara langsung, hal ini membuat PKI harus memutar otak untuk mendapatkan kekuatan dan bisa melemahkan kalangan militer. Maka dari itu cara yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyebarkan isu dewan jenderal. Isu Dewan Jenderal ini diisukan bertujuan untuk mengkritisi pemerintahan Soekarno yang dilakukan oleh petinggi-petinggi TNI-AD yang tidak loyal terhadap Soekarno dan berkembang menjadi isu akan diadakannya kudeta terhadap presiden Soekarno yang kala itu diketahui sedang dalam keadaan sakit. Agar isu tersebut tersebar luas dengan baik dan terlihat tanpa adanya unsur kesengajaan maka Soedjarwo Harjowisastro, seorang anggota PKI di DPR-GR telah

meneruskan kepada kepala staf BPI, Brigjen Pol Soetarto yang juga pendukung PKI sebagai bentuk informasi untuk disampaikan kepada Soekarno.

Biro Khusus bertindak aktif kembali dalam penyebaran isu ini, dengan mengembangkan terus-menerus isu yang dianggap dapat membahayakan negara maka Biro Khusus berhasil mendapat tanggapan luas dan diterima bahwa Dewan Jenderal memang benar adanya terutama oleh Soekarno. Isu Dewan Jenderal ini mulai terdengar pada bulan Mei 1965. (Sekretariat Negara RI, 1994: 62)

Dilingkungan Intern PKI sendiri telah disebarkan isu yang sama bahwa keberadaan Dewan Jenderal memang benar-benar ada. Ini dilakukan sebagai upaya agar dapat menanamkan kebencian dan sikap permusuhan terhadap pimpinan TNI-AD. Keberadaan Dewan Jenderal ini disebarkan melalui pemikiran-pemikiran PKI bahwa petinggi-petinggi yang menjabat didalam Dewan Jenderal tidak menyukai PKI bahkan sangat anti PKI.

Isu Dewan Jenderal yang direkayasa oleh Aidit dan Sjam sebagai pimpinan dari Biro Khusus di disebarluaskan juga melalui BPI pimpinan Dr. Soebandrio. Kemudian disiarkan secara terbuka dan lebih luas lagi oleh aktivis PKI diberbagai lingkungan pemerintahan, birokrasi dan partai-partai politik. Penyebarluasannya melalui lembaga-lembaga tinggi negara, seperti DPR, DPA, Front Nasional dan lainnya, dan dilakukan oleh anggota-anggota PKI dilembaga-lembaga tersebut. Untuk menyebar luaskan isu ini dikalangan masyarakat dimanfaatkan juga organisasi-organisasi dibawah payung PKI. Jika isu ini sampai disebarluaskan ke kalangan masyarakat jelas bahwa itu merupakan upaya PKI untuk mempengaruhi opini publik terhadap kalangan militer dengan *image* buruk terhadap ABRI khususnya TNI-AD yang disebut-sebut sebagai musuh utama PKI karena merupakan kekuatan militer Indonesia yang loyal pada konstitusi 1945, pada Pancasila dan tegas anti komunis.

Bersamaan dengan adanya isu Dewan Jenderal tersiar pula kabar mengenai isu "*Dokumen Gilchrist*". Gilchrist adalah nama duta besar Inggris di Jakarta yang nama lengkapnya Sir Andrew Gilchrist dan bertugas di Indonesia pada tahun 1963-1966.

Masalah mengenai isu adanya dokumen Gilchrist ini mencuat pada tanggal 15 Mei 1965 wakil perdana menteri Dr. Soebandrio dalam kedudukannya sebagai BPI menerima surat

anonim melalui kantor pos Jakarta isi surat tersebut terdiri dari dua bagian. Pertama, isinya mengenai pengantar dari pengirim surat yang menyatakan adanya pengiriman sebuah dokumen yang berguna bagi revolusi. Bagian kedua sebagai lampiran berupa surat yang diketik tanpa tanda tangan ataupun paraf dari pembuatnya. Yang ada hanyalah ketikan nama Gilchrist. Surat ini ditulis pada formulir surat yang biasa digunakan oleh kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan seolah-olah dibuat oleh kedutaan Inggris yang ditujukan kepada Sekjen kementerian Luar Negeri Inggris.

Surat tersebut seolah-olah memuat laporan yang isinya mengenai koordinasi Duta Besar Inggris dengan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dalam menangani situasi di Indonesia. Karena adanya pernyataan *Our local army friend* “rekan-rekan “tentara setempat”, yang menimbulkan logika seolah-olah ada ikut campur dan kerjasama antara TNI-AD, Inggris dan Amerika Serikat. (Sekretariat Negara RI, 1994: 64)

Setelah pengiriman dokumen itu ke Sekjen Kementerian Luar negeri Inggris. Dr. Soebandrio menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Staf BPI Brigjen Pol. Soetarto untuk diperiksa, tetapi setelah diterimanya surat tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Departemen Angkatan kepolisian mengenai keaslian atau otentik tidaknya dokumen tersebut. Saat mengembalikan dokumen tersebut kepada Dr. Soebandrio ia menjelaskan bahwa formulir Dokumen Gilchrist ini serupa dengan formulir yang pernah disita oleh BPI pada tahun 1963, dari demonstrasi yang pada saat itu berdemostrasi di depan Gedung Kedubes Inggris di Jakarta. Setelah mendapatkan pernyataan itu Dr. Soebandrio segera memperbanyak “dokumen Gilchrist” itu.

Pada tanggal 26 Mei 1965 Dr. Soebandrio membawa dokumen Gilchrist tersebut kepada Presiden Soekarno. Kemudian Soekarno memanggil semua Panglima ABRI di Istana Merdeka. Keesokan harinya berkumpul panglima ABRI yang hadir pada saat itu adalah MenPangad Letjen TNI A. Yani, Men/Pangal Laksdya R.E. Martadinata, Men/Pangau yang diwakili oleh Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang, Men/Pangak Irjen Pol. Soetjipto Joedodihardjo, dan Dr. Soebandrio. Sementara Presiden Soekarno membacakan isi Dokumen tersebut Dr. Soebandrio memberikan

fotokopiannya kepada para Panglima yang telah hadir.

Setelah pembacaan selesai Soekarno meminta penjelasan kepada Letjen TNI Ahmad Yani dengan mempertanyakan adakah anggota TNI-AD yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika. Ahmad Yani menjawab “Tidak ada” kemudian presiden Soekarno juga menanyakan mengenai desas desua adanya Dewan Jenderal di tubuh TNI-AD, ia sempat bertanya kepada petinggi TNI-AD yaitu Men/Pangad, Letjen Ahmad Yani dan menanyakan kebenaran tentang isu adanya Dewan Jenderal untuk merebut kekuasaan dari Presiden/panglima Tertinggi ABRI. Ahmad Yani menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Jenderal tersebut sebagai suatu lembaga yang bertugas mengevaluasi karier para perwira TNI yang akan naik pangkat. Jadi sangat tidak dibenarkan oleh Ahmad Yani bahwa keberadaan Dewan Jenderal adalah untuk menilai kebijakan presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi (PBR) terlebih lagi untuk mengukudeta pemerintahannya.

Setelah dilakukannya pertemuan dengan presiden Soekarno maka dijernihkanlah permasalahan mengenai isu “Dewan Jenderal” dan “Dokumen Gilchrist” yang dianggap sebagai penguat dari adanya isu “Dewan Jenderal”. Jadi sebenarnya isu bahwa Dewan Jenderal akan mengambil kekuasaan di tangan presiden Soekarno hanya isapan jempol belaka sebagai bentuk dari propaganda PKI terhadap jenderal TNI-AD.

Penjernihan masalah isu Dewan Jenderal dan isu Dokumen Gilchrist yang diberatkan kepada TNI-AD memang telah dilakukan dengan adanya pertemuan antara para Panglima ABRI dan presiden Soekarno. Tetapi pada pertengahan tahun 1965 diadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Al-jazair. Dr. Soebandrio yang pada saat itu ikut menghadiri acara tersebut membawa dan menyebarkan salinan Dokument Gilchrist dengan dibagi-bagikannya salinan dokumen tersebut kepada para anggota delegasi KAA. Jadi isu mengenai Dokumen Gilchrist ini justru banyak beredar diluar negeri. (Herman, 2015: 119)

Dr. Soebandrio sebagai kepala Badan Pusat Intelijen tidak mencermati keotentikan dokumen Gilchrist ini terlebih dahulu meskipun sebelumnya ia sudah menyerahkan kepada Kepala Staf BPI Brigjen Pol untuk diperiksa tetapi pernyataan yang diberikan oleh Brigjen Soetarto itu tidak bisa dibenarkan hanya karena

formulir tersebut serupa dengan hasil sitaannya pada tahun 1963 dari para Demonstrans di Gedung Kedubes Inggris. Kemudian Dr. Soebandrio seharusnya tidak langsung melaporkan kepada presiden Soekarno serta ia dengan lancang menyebarkan luaskan Dokumen ini tanpa memperhatikan keaslian dari dokumen tersebut. Hal ini setidaknya menjelaskan adanya penyimpangan politik dengan tujuan tertentu, setidaknya untuk mengadu domba Presiden Soekarno dan TNI-AD serta membuat kekacauan politik di level Nasional dan bahkan Internasional karena penyebaran dokumen tersebut kepada para delegasi yang menghadiri KAA. Tindakan Dr. Soebandrio yang menyebarkan dokumen ini secara langsung maupun tidak telah menguntungkan garis politik dan strategi PKI, para organisasi serta orang-orang orbitannya.

Biro Khusus yang sejak dulu membina para perwira kalangan militer tetap melakukan tugasnya selain terus membina agar loyal kepada PKI, Biro Khusus juga memanfaatkan isu Dewan Jendral dan Dokumen Gilchrist agar para perwira membenci petinggi-petinggi TNI-AD yang dianggap penghianat. Biro Khusus yang merancang perebutan kekuasaan, dengan menyebarkan isu-isu politik yang menfitnah TNI-AD, juga secara intensif membina oknum-oknum perwira yang pro-komunis dengan briefing-briefing politik.

Lingkup pengembangan dan penyebaran isu mengenai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta dan anti PKI dilakukan penyebaran isu yang menyatakan tentang adanya “Dewan Jenderal” didalam tubuh TNI-AD yang mempunyai tugas khusus memikirkan usaha-usaha dalam rangka menghadapi kegiatan kelompok-kelompok komunis terutama PKI, dengan isu tersebut PKI melalui Biro Khusus ingin menciptakan kesan bahwa sebenarnya TNI-AD adalah kekuatan yang bersifat “kanan” pendukung Nekolim dan pastinya anti-PKI. Dengan disebutnya Dewan Jenderal sebagai kekuatan “kanan” pendukung Nekolim itu bertujuan untuk memberikan kesan bahwa tugas utamanya menilai kebijaksanaan presiden Soekarno sebagai Pemimpi Besar Revolusi (PBR). Pada lingkup ini PKI ingin memberikan kesan bahwa “Dewan Jenderal” merupakan badan dalam tubuh TNI-AD yang loyalitasnya tidak dapat dijamin sama sekali kepada Soekarno dengan demikian muncullah pemikiran-pemikiran mengenai ketidakpercayaan terhadap TNI-AD dengan begitu

dapat mengadu domba antara presiden Soekarno dan TNI-AD. Dilontarkan isu bahwa “Dewan Jenderal” bekerja sama dengan imperialis, sebagai upaya PKI menyebarkan kesan kepada masyarakat seolah-olah TNI-AD telah mengkhianati perjuangan rakyat Indonesia. Isu ini semakin berkembang dan memanas setelah munculnya isu “Dokumen Gilchrist” pada bulan Mei 1965. Pada sekitar awal September 1965 dilancarkan isu bahwa “Dewan Jenderal” akan melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari presiden Soekarno kemudian untuk mendukung kebenaran mengenai kudeta tersebut maka tersiar adanya informasi bahwa akan ada pengerahan pasukan dari daerah-daerah yang akan didatangkan ke Jakarta dalam rangka HUT ABRI pada tanggal 5 oktober 1965.

Untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai kebenaran adanya “Dewan jenderal” yang akan merebut kekuasaan Soekarno PKI telah menyusun rencana dengan menciptakan isu “kabinet Dewan Jenderal”. Susunan kabinet itu adalah:

- 1) Perdana Menteri:
Jenderal TNI A.H. Nasution
 - 2) Wakil PM/Menteri Pertahanan:
Letjen TNI A. Yani
 - 3) Menteri Dalam Negeri:
Hadisubeno
 - 4) Menteri Luar Negeri:
Roeslan Abdul Gani
 - 5) Menteri Hubungan Perdagangan Luar Negeri:
Brigjen TNI Soekendro
 - 6) Menteri Jaksa Agung:
Mayjen TNI S. Parman
- (Sekretariat Negara RI, 1994: 63)

Biro Khusus menciptakan suasana yang panas dengan hasil dari briefing yang dilakukannya terhadap perwira yang pro-komunis paling tidak menghasilkan dua pemikiran. Pertama, adanya Dewan Jenderal yang akan mengkhudeta presiden dan pemerintah. Kedua, untuk melawannya, perlu ada gerakan militer dari pihak PKI untuk mendahului rencana Dewan Jenderal sehingga dapat menggagalkan kudeta yang disebut-sebut akan dilakukan oleh TNI-AD melalui Dewan Jenderal tersebut.

Pengembangan isu mengenai tampilnya Dewan Jenderal dengan disusunnya kabinet Dewan jenderal sebenarnya untuk mematangkan rencana akan adanya gerakan dari perwira-perwira yang berpikiran maju mendahului rencana “Dewan Jenderal”. Hal ini diinformasikan

kepada Men/Pangau Laksamana Madya Omar Dhani oleh letkol Heru Atmodjo dan Brigjen TNI Soepardjo pada tanggal 30 september 1965. Tetapi setelah mendengar informasi itu Omar Dhani tidak mencoba untuk mencegahnya dia hanya mengarahkan kepada Brigjen Soepardjo untuk mengutamakan keselamatan presiden Soekarno dan meminta agar Soekarno bisa tidur di Komando Operasi AURI, dipangkalan Udara Halim Perdankusumma.

Pada tanggal 4 Agustus 1965 presiden Soekarno Dikabarkan sakit. informasi sakitnya presiden ini diketahui oleh D.N Aidit yang saat itu berada di peking. Kemudian ia kembali ke Jakarta dan membawa dua dokter dari RRC untuk memeriksa keadaan Presiden, menurut keterangan tim dokter RRC terdapat dua kemungkinan dengan jatuh sakitnya presiden Soekarno. Pertama, kesehatan presiden Soekarno semakin memburuk akan memungkinkan beliau segera wafat. Kedua, apabila ternyata presiden Soekarno sembuh kembali, beliau akan menjadi lumpuh.

Mendengar kabar buruk ini Aidit segera melakukan pertemuan dengan Politbiro PKI dan membicarakan tentang sakitnya presiden tersebut. Kemudian Aidit mengevaluasi keadaan pertentangan PKI dengan TNI-AD yang ia asumsikan bahwa pertentangan ini masih bisa di cegah untuk tidak muncul secara fisik karena masih kuatnya kepemimpinan presiden Soekarno sehingga setelah mendengar kabar sakitnya presiden ia berpendapat pertentangan fisik tidak akan dapat dihindari apabila kepemimpinan Soekarno tidak ada lagi atau tidak efektif lagi. Dalam situasi seperti itu Aidit berpendapat TNI-AD lah yang mempunyai kemampuan untuk menggulung PKI. Oleh karena itu maka PKI harus melaksanakan langkah-langkah agar dapat mendahului TNI-AD dan dapat melumpuhkannya.

Sehubungan dengan evaluasi dari Aidit itu, maka pada tanggal 12 Agustus 1965 ia memanggil Sjam kepala Biro Chusus central untuk mempersiapkan cara-cara menyusun kekuatan bersenjata agar dapat mendahului dan melemahkan TNI-AD dan mengupayakan agar gerakan yang dilancarkan itu bersifat terbatas, seolah-olah merupakan persoalan intern Angkatan Darat. Meskipun diketahui bahwa kesehatan presiden Soekarno telah membaik dan dapat berpidato dalam acara HUT RI, tetap saja rencana PKI untuk melumpuhkan TNI-AD tetap dilanjutkan.

Biro Chusus menindak lanjuti segera perintah dari Aidit, Sjam sebagai ketua dari Biro Chusus mengadakan pendataan lebih lanjut untuk memilih perwira-perwira ABRI yang telah dibina PKI untuk ditunjuk sebagai komandan pelaksana. Hingga akhirnya dapat berhasil menyusun nama-nama yang akan menjadi komandan pelaksana gerakan dan telah dilaporkan kepada Aidit pada tanggal 26 Agustus 1965 dan disetujuinya. Diantara nama-nama itu adalah Letkol Inf. Untung (dan Yon Pengawal Presiden), Kolonel Inf. A. Latief (dan Brigif), Mayor Udara Sujono (dan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan), Mayor Inf. Agus Sigit (dan Yonif), kapten art. Wahjudi (dan Yon Arhanud).

Sesuai keputusan CC PKI gerakan yang akan dilakukan itu dipimpin oleh ketua CC PKI D.N. Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan dan ketua Biro Chusus Central PKI, Sjam sebagai pimpinan pelaksana gerakan yang menyusun, mengatur dan memimpin pelaksanaan instruksi dari politbiro. Pono sebagai wakil pimpinan pelaksana gerakan, serta Walujo sebagai impinan bagian observasi. Dalam Gerakan di Jakarta Raya atau ditingkat Pusat dilibatkan juga Letkol Inf. Untung, Kolonel Inf. A. Latief dan Mayor Udara Sujono.

Dasar pertimbangan dijadikannya Sjam Kamaruzzaman sebagai pimpinan Gerakan adalah karena ia Kepala Biro Chusus yang tugasnya membina kalangan militer yang secara langsung bertanggungjawab dan berada dibawah D.N. Aidit, Biro Chusus juga tidak pernah diperkenalkan keluar sehingga masyarakat pada umumnya belum mengenal Sjam. Biro Chusus pimpinan Sjam ini pada hakikatnya adalah suatu organ PKI yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ilegal PKI dalam bentuk gerakan militer. Gerakan yang direncanakan bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kelompok pimpinan saja sehingga pertimbangan bahwa satu-satunya jalan untuk dapat menjalankan dengan baik gerakan ini harus melalui Biro Chusus yang sejak lama telah menjadi aparat rahasia PKI.

Biro Chusus sebagai alat pemikir Politbiro CC PKI dan penggerak awal pemberontakan, terus mengadakan rapat untuk menentukan cara-cara terbaik dan waktu yang tepat untuk melancarkan pemberontakan. Rapat yang biasanya hanya dilakukan sekali atau dua kali dalam sebulan lebih ditingkatkan lagi menjadi 10 kali dalam sebulan. Sejak akhir Agustus 1965 sampai dengan 29 september 1965 pimpinan

kolektif Biro Chusus secara terus menerus mengadakan pertemuan-pertemuan yang kesimpulannya disampaikan kepada ketua CC PKI D.N. Aidit untuk mendapatkan keputusan dan instruksinya.

Rapat diadakan secara terus menerus oleh Biro Chusus baik di rumah Kolonel A. Latief di jalan Cawang I Kavling 524/525, dikantor CC PKI, jalan Kramat Raya 81, atau di rumah kepala Biro Chusus Sjam Kamaruzzaman di Rawasari, Jakarta Timur.

Saat melakukan rapat yang semakin sering dilakukan Sjam Kamaruzzaman selaku ketua Biro Chusus dan pimpinan pelaksana gerakan telah mengadakan pertemuan dengan kepala Biro Chusus daerah-daerah PKI, untuk membicarakan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar dapat aktif mendukung pelaksanaan Gerakan. Pada tanggal 4 september Sjam bertemu dengan Endro Sulistiyo selaku kepala Biro Chusus Daerah Jakarta Raya. Tanggal 8 september 1965 dengan Kepala Biro Chusus Daerah Jawab Barat, Harjana alias Lie Tung Tjong. Pada tanggal 13 September 1965 dengan Kepala Biro Chusus Daerah Jawa Timur bernama Rustomo. Pada tanggal 15 september 1965 dengan Kepala Biro Chusus Daerah Jawa Tengah bernama Salim alias Darmo alias Tikno. Tanggal 17 september 1965 dengan Kepala Biro Chusus Daerah Sumatera Barat, Rivai. Pada tanggal 20 september 1965 Kepala Biro Chusus Daerah Sumatera Utara bernama Amir alias Nazir. Dari sekian pertemuan yang diadakan dengan Kepala Biro Chusus Daerah-daerah ternyata Daerah Jakarta tidak memiliki pasukan yang besar meskipun dapat dihimpun lebih kurang 6 batalion pasukan campuran. (Sekretariat Negara RI, 1994: 86)

Instruksi yang diberikan Sjam Kamaruzzaman kepada setiap Kepala Biro Chusus Daerah adalah, supaya di daerah masing-masing dibentuk komando sebagai pimpinan daerah dan komando ini harus dikealoi oleh Biro Chusus Daerah setempat, kemudian dipersiapkan tenaga-tenaga untuk menjadi anggota Dewan Revolusi Daerah, agar dapat memperlancar pergerakan di daerah-daerah maka harus menguasai instansi-instansi vital di daerahnya dan ada unsur ABRI didalamnya sebagai bentuk dari kekuatan militer, diharuskan selalu mengikuti siaran RRI Jakarta agar dapat dengan mudah mengetahui dimulainya gerakan. Instruksi ini bersifat rahasia sehingga setiap pembicaraan mengenai Gerakan tidak

diperbolehkan didiskusikan kepada luar dari Biro Chusus Daerah setempat.

Pada bulan September penyusunan rencana-rencana mengenai Gerakan semakin dipersiapkan. Pada pertengahan bulan september 1965 Aidit telah menginstruksikan kepada Sjam ketua Biro Chusus untuk membentuk konsep "Dewan Revolusi" sebagai badan politik dari gerakan bersenjata. Pembentukan Dewan Revolusi ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa dewan ini sesuai dengan gagasan Nasakom yang mencakup dan mewakili semua kalangan masyarakat baik itu sipil maupun militer, meskipun tidak mengetahui rencana mengenai gerakan PKI didalam konsepnya dimasukan nama-nama pejabat dan tokoh diluar Jawa dan beberapa panglima kodam hanya untuk sekedar meyakinkan anggot-anggotanya. Konsep Dewan Revolusi dibentuk sedemikian rupa seolah-olah orang-orang Komunis tidak mendominasi didalamnya. fungsi dari Dewan Revolusi ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan bersifat sementara meskipun tetap melaksanakan keputusan dari CC PKI, karena bersifat sementara maka tugas dewan ini akan berakhir setelah dibentuknya pemerintahan baru.

Selain menyusun Dewan Revolusi Biro Chusus juga mempunyai tugas membentuk "Dewan Militer". Anggota dari Dewan Militer adalah D.N. Aidit, Sjam dan beberapa perwira yang dianggap berpengaruh seperti Mayjen TNI Pranoto Reksosamodro dan Mayor Udara Sujono yang fungsinya untuk memberikan pendapat-pendapat dari sudut pandang militer mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan Gerakan. nantinya Dewan Militer ini akan mengadakan rapat untuk yang pertama kalinya pada tanggal 30 september 1965.

Inti sasaran dari diadakannya gerakan PKI ini adalah untuk melakukan "pembersihan" Dewan Jenderal para perwira tinggi TNI-AD yang dianggap akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Tetapi pada dasarnya bagi PKI TNI-AD adalah batu terbesar yang menghalangi untuk terciptanya negara komunis di Indonesia. Ditetapkanlah sasaran operasional pasukan Pasopati atau sasaran utama dari Gerakan ini yaitu para Jenderal pimpinan TNI-AD, Jenderal TNI A.H. Nasution Menhankam Kasab, Men/Pangad Letjen TNI Ahmad Yani, dua Deputi Kasad yakni Mayjen Tni Suprpto, Mayjen TNI MT Haryono, Mayjen S. Parman, Kepala Intelijen TNI-AD, Asisten IV (Logistik) Kasad, Brigjen TNI DI Pandjaitan, serta Brigjen TNI Sutoyo Siswohardjo, Inspektur Peradilan

(jaksa Agung) Angkatan Darat. merekalah nama-nama yang terdaftar dalam gerakan PKI untuk diculik dan kemudian dihadapkan pada Soekarno untuk mempertanggung jawabkan tuduhannya sebagai orang-orang yang tidak setuju terhadap kebijakan presiden Soekarno yang “pro komunis” dan karena sikap mereka yang sangat anti komunis.

Pasukan Bima Sakti menduduki berbagai instansi vital dan objek penting, sedangkan pasukan Gatotkaca menerima hasil-hasil operasi yang dilancarkan oleh pasukan Pasopati. Pada tanggal 28 september 1965 Sjam melaporkan semua persiapan yang sudah dilakukan kepada D.N. Aidit. kemudian Sjam juga menentukan hari dan jam pelaksanaan Gerakan yakni pada tanggal 30 september 1965 pukul 04.00, hal ini telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan tertinggi Aidit dan ia memberikan nama pada Gerakan ini “Gerakan 30 september”. Tetapi karena belum berkumpulnya Komandan satuan yang akan melaksanakan penculikan pada tanggal 29 september 1965 telah membuat Sjam untuk mengubah hari pelaksanaan Gerakan menjadi tanggal 1 oktober 1965 pukul 04.00 menjelang dini hari. Walaupun demikian nama dari Gerakan ini tetap 30 september meskipun dilaksanakan pada tanggal 1 oktober 1965. (Aco Manafe, 2007: 98)

Kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan dan memantapkan rencana-rencana yang telah disusun untuk Gerakan. D.N. Aidit selaku pimpinan tertinggi Gerakan melalui Biro Khusus memerintahkan Letkol Inf. Untung untuk memberikan pengarahan kepada para pimpinan pelaksana Gerakan. Mereka adalah Kolonel Inf. Bambang Supeno, Kapten Inf. Suradi, Mayor Udara Gathut Soekrisno, Kapten Inf. Kuntjoro, Lettu Inf. Dul Arief, serta Sjam dan Pono. Pengarahan yang diberikan Letkol Inf. Untung adalah tentang akan diadakannya Gerakan pendahuluan untuk memberikan pukulan kepada “Kekuatan Dewan Jenderal” yang disebut-sebut akan melakukan Kudeta. Letkol Inf. Untung juga menjelaskan mengenai pembagain tugas, penentuan lokasi Cenko, menjelaskan tanda-tanda pengenal, kode-kode dan semua yang berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan. Sebelum melakukan penculikan arahan ini kembali diberikan pada pukul 01.30 1 oktober 1965.

Pada tanggal 30 september sekitar pukul 21.00 Dewan Militer melakukan rapat di rumah Sjam di jalan Pramuka, Jakarta Timur. Hadir D.N. Aidit, Sjam, Mayjen TNI Pranoto

Reksosamudro dan Mayor Udara Sujono. Hal-hal yang dibicarakan adalah D.N. Aidit mengecek kesiapan terakhir dari keseluruhan rencana Gerakan, mengesahkan adanya Dewan Militer, menyerahkan daftar nama Dewan Revolusi yang akan diumumkan nantinya dan harus ditanda tangani oleh ketua dan wakil ketua. Kemudian D.N. Aidit memerintahkan kepada pimpinan pelaksana Gerakan dan petugas-petugas untuk segera menempati pos masing-masing dan menunggu waktu untuk bertindak.

Berbagai persiapan Gerakan telah dilakukan di tingkat pusat, Jakarta. Persiapan juga dilakukan diberbagai daerah-daerah setempat oleh Sjam ketua Biro Khusus central yang juga menjadi pimpinan pelaksana gerakan yakni di Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Keterlibatan Sjam Kamaruzzaman dalam Gerakan 30 September 1965



Sjam Kamaruzzaman

Sumber data: *Indocorpcircles.wordpress.com*

Diawali dengan karier politik PKI yang semakin melesat dengan cepat dikancah politik Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu partai politik yang patut diperhitungkan, kemudian PKI melakukan ofensif untuk menguasai para Buruh dan petani dikalangan mayoritas Masyarakat, ofensif untuk menguasai partai politik dan organisasi massa, pembentukan Biro Khusus yang dipimpin oleh Sjam Kamaruzzaman untuk melakukan pembinaan dikalangan militer sehingga dapat menguasai pertahanan dan keamanan dengan

keberhasilan dibinanya beberapa perwira-perwira tinggi ABRI.

Berbagai persiapan untuk melancarkan Gerakan 30 September telah dilakukan, D.N. Aidit sebagai pimpinan Gerakan, kepala Biro Khusus CC PKI Sjam para anggota Politbiro dan Dewan Militer bentukan PKI merasa rencana telah tersusun dengan matang akan melakukan pemberontakan mendahului gerakan perebutan kekuasaan Dewan Jenderal. Gerakan Dewan Jenderal hanya isu belaka yang dibuat oleh PKI sendiri ini hanya alasan agar PKI dapat melakukan Kudetanya terhadap pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno agar dapat menjadikan Indonesia sebagai negara Komunis seutuhnya.

Menjelang pemberontakan akan dilaksanakan, persiapan akhir telah dilakukan termasuk persiapan akhir Pasukan yang akan melakukan penculikan. Sejak pukul 10.00 30 september 1965, Letkol Inf. Untung telah berangkat menuju Lubang Buaya bersama anggota Cakrabirawa yang telah ia siapkan dari asramanya di Tanah Abang II. Disana ia dan anggota Cakrabirawa bergabung dengan sebagian anggota Batalyon 454, 530, pasukan PGT, Brigif I dan Sukta yang terdiri dari sejumlah anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani.

Pada pukul 01.30 dini hari 1 oktober 1965, Letkol Inf. Untung memerintahkan pelaksanaan gerakan "pembersihan". Kepada semua komandan pasukan. Mereka diminta segera menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Disana telah hadir juga Brigjen TNI Soepardjo, Kolonel Inf. A Latief, diikuti kepala Biro Khusus PKI Sjam dan Pono tiba di Lubang Buaya. Tujuan utama gerakan adalah melakukan penculikan kepada tujuh perwira tinggi TNI-AD yang namanya sudah ada dalam daftar penculikan. (Aco Manafe, 2007: 106)

Gerakan pemberontakan ini mengerahkan semua pasukan untuk gerakan yang tadinya datang untuk mengikuti perayaan HUT ABRI 5 oktober 1965 yaitu satu kompi dari resimen Cakrabirawa yakni Batalyon Penjaga Kehormatan Pertama (pasukan pengawal presiden). Batalyon 454 dan Batalyon 530. Nantinya semua pasukan ini akan digabungkan dengan 2.000 personel pasukan massa PKI yang berlatih di Lubang Buaya.

Pembagian tugas pasukan penculik, yakni pasukan Pasopati bertugas menculik para Jenderal pimpinan TNI-AD dan membawa mereka ke Lubang Buaya. Kekuatan bersenjata yang tergabung dalam pasukan Pasopati terdiri

atas satu Batalyon Infanteri (minus) dari Brigade Kolonel Inf. A. Latief, satu komp Cakrabirawa dari batalyon infanteri pimpinan Mayor Inf. Sukirno/kapten inf. Kuntjoro, dan peleton-peleton Sukwan PKI. Sedangkan untuk pimpinan pasukan Pasopati sendiri adalah Lettu Inf. Dul Arief. Pada pukul 02.30 dini hari segera mengumpulkan dan memberikan brifing kepada pasukan dalam formasi yang telah ditentukan seperti sebelumnya.

Pembagian formasi tersebut adalah, pasukan yang bertugas menculik Jenderal TNI A.H. Nasution dipimpin oleh Pelda Djahurub, bawahan Letkol Inf. Untung dari resimen Cakrabirawa dengan kekuatan satu kompi bersenjata, serta satu peleton Sukwan PKI. Pasukan yang bertugas menculik Letjen Tni Ahmad Yani, dipimpin Peltu Mukidjah, bawahan Kolonel Inf. A Latief, dengan kekuatan satu kompi, masing-masing satu peleton Brigif I jaya, 1 regu cakrabirawa, 1 Pleton 530, 1 peleton 454, 1 regu PGT, serta dua regu Sukwan PKI. pasukan yang menculik Mayjen TNI Soeprapto dipimpin serda Sulaiman, anak buah Letkol Inf. Untung, dengan pasukan satu peleton bersenjata Cakrabirawa, serta satu kelompok Sukwan PKI. Pasukan yang menculik Mayjen TNI S. Parman dipimpin Serma Satar, bawahan letkol Inf. Untung dengan kekuatan satu peleton bersenjata, masing-masing dari mereka adalah satu regu Cakrabirawa, satu peleton dari Batalyon 530 pimpinan Serma Paat, dan kelompok Sukwan PKI. Pasukan yang bertugas menculik Mayjen TNI Haryono MT dipimpin oleh Serma Bungkus, bawahan Letkol Inf. Untung dengan kekuatan satu peleton bersenjata dan Sukwan PKI. Mereka terdiri atas tiga regu, masing-masing pimpinan Sertu Arlan, Serda Carman dan Serda Syahnan. Pasukan yang bertugas menculik Brigjen TNI Sutojo S dipimpin sermas Surono, bawahan Letkol Inf. Untung dengan kekuatan bersenjata masing-masing tiga regu pimpinan Serda Sudibya, Serda Ngatiyo, Kopda Dasuki seta satu kelompo Sukwan PKI. Pasukan yang bertugas menculik Brigjen TNI D.I Pandjaitan sebanyak 1 peleton dipimpin Serda Soekardjo, anak buah kapten Inf. Koentjoro dari Batalyon 454 Diponegoro, yang terdiri dari dua regu Brigif I Jaya dan satu regu Batalyon 454, dibantu satu kelompok Sukwan PKI.

Pasukan Bima Sakti bertugas menguasai Ibukota Jakarta yang dipimpin oleh Kapten Inf. Suradi dengan kekuatan satu batalyon Infanteri (minus) dipimpin oleh Mayor Inf. Bambang Supeno, dan satu batalyon Infanteri (minus)

yang dipimpin oleh kapten Inf. Kuncoro, empat batalyon Sukwan PKI, dan satu kompi Infanteri (plus) pimpinan kapten Inf. Suradi, berasal dari Brigif pimpinan Kolonel Inf. A. Latief. Pasukan ini berhasil menduduki dan menguasai objek-objek vital sebagai sarana penyiaran kegiatan Gerakan 30 September adalah gedung Studio RRI Jakarta di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dan Gedung telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Pasukan Gatotkaca dipimpin oleh Mayor Udara Gathut Soekrisno berkedudukan di Basis Gerakan Lubang Buaya, satuan ini berfungsi sebagai pasukan cadangan yang bertugas menampung tawanan hasil penculikan serta melaksanakan pembunuhan dan penguburan korban-korban penculikan. Kekuatan yang tergabung dalam pasukan ini adalah Sukwan dan Sukwati PKI yang tergabung dalam pasukan Gatotkaca terdiri atas anggota-anggota PR dan Gerwani yang pernah mendapat pelatihan di Lubang Buaya dengan jumlah sekitar 2.000 orang. Setelah mengumpulkan pasukannya Mayor Udara Gathut Soekrisno berpidato dan mencoba menyulut kebencian terhadap apa yang mereka sebut dengan penyelewengan dari "Dewan Jenderal" yang disebut-sebut akan merebut kekuasaan dari presiden Soekarno. (Aco Manafe, 2007: 109)

Di Lubang Buaya pada pukul 05.30 1 Oktober 1965 pimpinan Pasukan Gatotkaca Mayor Udara Gathut Soekrisno menerima para korban penculikan dari pasukan Pasopati. Korban penculikan yang masih hidup ada 4 orang dan 3 lainnya sudah meninggal oleh tembakan-tembakan pasukan penculik. Korban penculikan yang masih hidup diisiksa bahkan hingga meninggal. Para korban ini adalah 6 jenderal serta seorang perwira pertama TNI-AD, tetapi jenderal A.H. Nasution tidak termasuk dalam korban yang berhasil diculik karena ia berhasil melarikan diri.

Pimpinan pasukan penculik melaporkan keberhasilannya atas penculikan dan lolosnya Jenderal A.H. Nasution kepada Sjam selaku pimpinan pelaksana Gerakan 30 September/PKI. Kemudian, Kelima tokoh perencana dan pelaksana gerakan 30 September meninggalkan Lubang Buaya menuju Gedung Penas yang terletak di Jalan Jakarta Bypass (sekarang Jalan Jenderal D.I. Pandjaitan), merupakan Cenko I untuk membicarakan langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan. Disana, Sjam memutuskan untuk mengirim salah satu dari mereka sebagai delegasi untuk menghadap presiden pada pagi

hari. Maka ditunjuklah Brigjen Soepardjo untuk menghadap presiden meskipun awalnya terlihat terkejut tetapi Sjam segera dapat mempengaruhi Brigjen Soepardjo dengan mengatakan bahwa keberhasilan dari pemberontakan ini tergantung kepada hasil delegasi ke istana.

Sjam kepada Brigjen Soepardjo juga mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang masuk ke istana, dari mana ia harus masuk, menjelaskan kode-kode yang digunakan agar dapat dipahami, dan memberitahukan siapa-siapa petugas yang ditempatkan diberbagai pintu, serta masalah teknis lainnya. Tugas Brigjen Soepardjo adalah melapor kepada presiden Soekarno tentang adanya gerakan dari perwira-perwira muda TNI-AD untuk menyelamatkan revolusi dari kudeta "Dewan Jenderal" dan menjemput serta membawa presiden Soekarno dari Istana Negara ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. Tugas ini ia jalankan bersama Mayor Inf. Bambang Soepono, Mayor Inf. Soekirno serta letkol Udara Heru Atmodjo. Nada ucapan Sjam kepada Brigjen Soepardjo mengandung perintah jika diperlukan memaksa kepada Presiden Soekarno untuk bersedia dibawa ke Halim Perdanakusumah.

Penjemputan Presiden ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah pada dasarnya adalah tindak lanjut dari serangkaian politik PKI yang mencakup memaksa presiden Soekarno untuk merestui tindakan gerakan 30 September seolah-olah sebagai tindakan sekelompok anggota TNI-AD yang tidak puas terhadap kepemimpinan TNI-AD, memaksa presiden Soekarno untuk merestui pembentukan Dewan Revolusi dan semua keputusan yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi dan memaksa presiden Soekarno mengambil berbagai keputusan politik yang akan membawa PKI ke dalam kekuasaan politik di Indonesia. Dengan dikirimnya Brigjen Soepardjo sebagai delegasi, Sjam berharap Brigjen Soepardjo berhasil meyakinkan presiden Soekarno sehingga tugas utamanya itu berhasil. (Sekretariat Negara RI, 1994: 117)

Pada tengah hari Brigjen Soepardjo kembali ke Cenko II dan membawa perintah presiden yang intinya untuk segera menghentikan gerakan dan jangan sampai ada tumpah darah, perintah itu didiskusikan dan Sjam berpendapat bahwa adanya perintah ini hanya akan menimbulkan keragu-raguan dikalangan pimpinan gerakan, maka perintah itu pun diabaikan dan sama sekali tidak dipatuhi karena

perintah itu justru tidak menguntungkan bagi Gerakan 30 September.

Pada tanggal 1 Oktober telah diterima laporan bahwa sebagian pasukan Gerakan 30 September telah mundur ke Pondok Gede yang sejak awal ditetapkan sebagai tempat pemunduran bagi Gerakan, saat yang sama juga diterima laporan bahwa Pasukan Kostrad dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) telah menguasai pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. Karena ada laporan inilah maka disimpulkan bahwa Gerakan dinyatakan gagal.

Sjam kemudian merasa perlu untuk mengamankan D.N. Aidit sebagai pimpinan dari Gerakan agar dapat terus memimpin partai dan Gerakan oleh karena itu ia mengemukakan agar D.N. Aidit pergi ke Yogyakarta. Laporan mengenai kegagalan Gerakan telah diterima D.N. Aidit dari Sjam tetapi D.N. Aidit tetap memerintahkan untuk meneruskan kegiatan perlawanan.

Pada tanggal 2 Oktober sekitar pukul 13.00 setelah terjadi kontak senjata seluruh pimpinan Gerakan 30 September mengambil kesimpulan bahwa Gerakan telah gagal dan melaporkannya kepada Sjam karena tidak mampu bertahan dari tekanan kekuatan RPKAD. Menyadari Gerakan 30 tidak dapat dilanjutkan untuk melawan Pimpinan Pelaksana Gerakan membubarkan diri. Sjam, Pono dan Brigjen TNI Soepardjo sekitar pukul 14.00 meninggalkan diri menuju Kramat Pulo, Jakarta Pusat. Kemudian karena pimpinan pelaksana ini sadar adalah incaran dari RPKAD mereka melarikan diri ke berbagai daerah.

Enam hari setelah 30 September 1965, kesibukan melanda sejumlah pemimpin Biro Khusus, Sjam mengatakan saat mereka berkumpul bahwa tugas mereka sekarang adalah menyelamatkan diri sendiri dan ia pergi ke Bandung, Pono diperintahkan pergi ke Jawa Tengah dan Hamid dan Wandu berada di Jakarta untuk menghimpun Partai. Keputusan ini diambil tanpa adanya instruksi dari ketua PKI Aidit.

Selama di Bandung Sjam tidak berhubungan dengan pemimpin PKI di Jakarta, saat berada di Bandung ia sempat bertemu dengan beberapa petinggi pengurus PKI dari dan ketua Biro Khusus di Bandung, saat mendengar ada seseorang dari Aparat yang mengetahui keberadaannya maka ia akan segera berpindah tempat, tetapi masa pelarian Sjam yang cukup panjang selama sekitar 1 setengah

tahun itu terhenti karena pada tanggal 9 Maret 1967 ia tertangkap dalam Operasi Kodam Siliwangi dengan nama sandi Kalong.

Akhir Keterlibatan Sjam Kamaruzzaman Dalam Gerakan 30 September Tahun 1965

Setelah tertangkap pada tanggal 9 Maret 1967 Sjam diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), tetapi sebelumnya ia duduk di Mahmilub sebagai saksi dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia Sudisman yang telah menyebut-nyebut nama Sjam dalam pengadilan. Disanalah untuk pertama kalinya Sjam muncul di depan publik sebelum Gerakan 30 September terjadi. Di pengadilan Sudisman kabar mengenai Sjam Kamaruzzaman adalah sebagai kunci dari peristiwa Gerakan 30 September, namun sebelum Sjam menyatakan kesaksiannya banyak yang beranggapan bahwa Sjam adalah seorang sipil bagian dari inti Gerakan 30 September yang bertemu di Halim 1 Oktober 1965. Tetapi ada banyak yang menyatakan bahwa Sjam adalah nama samaran dari petinggi PKI. (Seri Buku Tempo, 2010: 2)

Saat memberikan kesaksiannya Sjam mengaku adalah Sjam yang asli dan satu-satunya yang mengetuai Biro Khusus bentukan ketua PKI D.N. Aidit. dan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Politbiro atau Komite Central PKI. Pernyataan ini mengejutkan penyidik dan pengamat karena sebelumnya tidak pernah diketahui adanya pembentuk Biro Khusus yang bahkan hal itu pun tidak pernah dimuat dalam koran dan disebut-sebut di pengadilan.

Sjam menjelaskan panjang lebar mengenai Biro Khusus, ia menjelaskan bagaimana ia beraksi dalam Biro Khusus untuk dapat berhubungan dengan kalangan militer, bagaimana ia mendapatkan informasi mengenai siapa-siapa dari kalangan militer yang pro dan anti PKI, dan cara-cara membujuk perwira-perwira ABRI untuk ikut bergabung dan dibina agar mau mendukung Gerakan PKI. Dalam kesaksiannya Sjam mengaku bahwa ia adalah orang yang mengorganisir G30S, dialah orang yang diperintah Aidit satu-satunya orang dari PKI yang berhubungan untuk mengantisipasi adanya kudeta dari "Dewan Jenderal" dengan memobilisasi perwira militer yang progresif dan pro-Soekarno.

Di pengadilan Mahmilub telah hadir pengamat yang mengamati setiap kesaksian dari Sjam, beberapa diantaranya merasa bahwa ada

keganjalan dengan apa yang disampaikan oleh Sjam dalam kesaksiannya. Untuk menjadi anggota PKI seseorang harus disumpah untuk menyimpan rahasia partai Dalam memberikan keasaksiannya tetapi Sjam dianggap sangat mudah membocorkan rahasia Partai, padahal apabila Sjam adalah orang yang dipercaya oleh Aidit berada diposisi yang tinggi didalam partai dan bahkan dipercaya untuk memegang pimpinan pelaksana dalam Gerakan 30 September melawan militer. Dengan posisi yang tinggi itu seharusnya lebih dari siapapun Sjam dapat menjaga dan menghormati apa yang telah ia sumapahi sebagai aturan yang berlaku. Kesaksian Sjam tidak mengindikasikan bahwa ia adalah pendukung PKI yang loyal namun menyesali tindakannya untuk melindungi partai seperti Sudisman. jika dia adalah sosok penting dan bersifat sangat rahasia dalam partai seharusnya ia berbicara layaknya seperti Sudisman yang mengutuk dikatatorr militer Soeharto seraya memuji-muji PKI.

Dalam pengadilan Sudisman telah hadir pengamat yang skeptis seperti Benedict Anderson, ia mencurigai bahwa Sjam adalah Agen tentara yang menyusup ke dalam PKI, karena dalam setiap kesaksiannya Sjam telah membenarkan sebagian dari propaganda tentara perihal kepemimpinan PKI dalam G30S. Bertahun-tahun pengadilan Sjam terus memberikan kesaksian yang memberatkan oranglain. Sjam seakan-akan ingin menimpakan sebagian keasalahan kepada Aidit. Sjam hanya ingin menunjukkan bahwa ia hanyalah pelaksana Aidit dalam melaksanakan G30S meskipun ia bertanggungjawab penuh atas G30S. Yang tidak digambarkan dalam kesaksiannya adalah seberapa berpengaruh ia terhadap Aidit dan keputusan-keputusannya, karena yang diketahui adalah Aidit sejak Agustus-sepetember 1965 menyuplai setiap informasi mengenai hal-hal yang terjadi dikalangan militer dari Sjam.

Dari kacurigaan Benedict Anderson mengenai Sjam adalah seorang Agen tentara inilah tersiar desas desus mengenai Sjam adalah seorang Agen Ganda. Sjam disebut-sebut sebagai mata-mata yang handal dari peristiwa gerakan 30 september 1965 dan bahkan menjadi Dalang dari Gerakan tersebut. Nama Sjam Kamruzzaman sebenarnya tidak begitu diketahui oleh kalangan elite di PKI hal ini dikarenakan tugasnya menjadi ketua Biro Khusus PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan TNI dan PNS, Biro Khusus ini bentukan D.N. Aidit yang hanya diketahui olehnya tanpa

sepengetahuan anggota petinggi PKI yang lain. (Herman, 2013: 195)

Sebagian pendapat menduga ia adalah agen ganda, pendapat umum bahwa Sjam adalah agen ganda memang masuk akal karena ada banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dan mendukung kearah munculnya sebuah operasi penumpasan dari suatu organisasi ataupun dari seorang tokoh Indonesia. berbagai posisi yang ia jabat membuat ia bebas masuk menyusup kemana saja selain ia aktif dan berpengaruh dalam organisasi buruh seperti Serikat Buruh Mobil, kemudian SOBSI dan PKI, ia juga pernah bertindak sebagai intel di Resimen 22 Brigade 10, divisi Diponegoro, dengan pangkat letnan I, eks Gabungan Yogyakarta, begitulah yang dikatakan oleh anggota tim Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) Subono Mantovani SH. Pengalaman menjadi intel juga ia dapatkan dari semasa perang kemerdekaan. Semasa perang kemerdekaan Sjam menjalin hubungan dengan anggota TNI yaitu komisarisi Polisi Modiegado, waktu itu Sjam dijadikan intelenjennya oleh Moedigdo. Dan disebut-sebut ia juga pernah menjdi intel kolonel Soewarto, direktur sekolah staf komando angkatan darat (Seskoad) pada tahun 1958.

Jelas ia adalah agen intelejen Aidit dari partai komunis dengan dibentuknya Biro Khusus yang diketuai Sjam sendiri sebagai upaya mempengaruhi kalangan tentara untuk mau masuk dan mendukung gerakan PKI.

Alasan lain ia disebut sebagai agen ganda adalah keterkaitannya dengan Soeharto yang sudah ia kenal sejak perang kemerdekaan bahkan Soeharto dan Sjam dalam satu kelompok pathuk, untuk beberapa alasan Soeharto memiliki dendam pribadi kepada beberapa Jendral Tentara Nasional Indonesia angkatan Darat (TNI AD), perasaan tidak suka Soeharto muncul ketika ia menganggap Ahmad Yani lebih unggul darinya ia merasa tersaingi padahal Soeharto merasa dari segi senioritas mereka setaraf, kecenderungan Soeharto tidak senang terhadap Ahmad Yani bahkan terlihat semenjak Soekarno mengangkat Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) padahal Soeharto beranggapan bahwa Yani masih dibawah soeharto saat Soeharto menjabat sabagai panglima kodam Diponegoro. Jelas dari sanalah Soeharto merasa bahwa Ahmad Yani adalah hambatan bagi kariernya ada anggapan bahwa Soeharto tidak akan naik apabila Ahmad Yani masih ada hal itu dikatakan oleh DR. Ben Anderson, seorang penulis dari *Cornell paper*.

Soeharto pernah terlibat kasus korupsi dan penyelundupan sehingga Nasution mencopot jabatan Soeharto sebagai panglima Diponegoro dan mengirimnya ke Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD) sekarang Seskoad. Hal ini membuat Soeharto dan kelompoknya merasa tidak senang. Ketika Ahmad Yani menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) justru Soeharto harus dikirim ke Seskoad. Selain itu Ahmad Yani menganggap kinerja Soeharto tidak baik dan payah dalam menjalankan tugas sehingga ia dicoret dari daftar Seminar Angkatan Darat "Tri Ubaya Cakti" tahun 1965. Alasan inilah yang digunakan oleh para ahli menyatakan bahwa Soeharto memiliki dendam terhadap Ahmad Yani sebagai salah satu petinggi Angkatan Darat. Sehingga ia ingin melenyapkan orang-orang yang dianggap akan menghambat jalannya menuju puncak tinggi militer. (Djarot, dkk, 2006: 64)

Dikatakan Soeharto juga memiliki dendam kepada D.I Panjaitan ketika menjadi sesama siswa saat berada di SSKAD. Menurut Brigjen TNI (Purn) Hario Kecik, Benih dendam itu muncul karena D.I Panjaitan yang menentang diangkatnya Soeharto menjadi ketua Senat Perwira Siswa di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD). Hal ini ditentanginya berdasarkan latar belakang Soeharto dikirim ke SSKAD yaitu karena Korupsi dan kasus Penyelundupan ketika masih menjabat sebagai Panglima Kodam Diponegoro.

Alasan-alasan inilah yang membuat beberapa ahli menilai tindakan Soeharto yang membiarkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dalam Gerakan 30 September 1965, dilatarbelakangi oleh motif dendam yang berdasarkan pada kepentingan pribadi, dan strategi mencapai puncak dalam pimpinan Angkatan Darat. Dari hal ini juga Soeharto dinyatakan terlibat dalam gerakan G 30 S bahkan ia juga disebut sebagai dalang dari Gerakan 30 S. Maka dengan adanya alasan-alasan tersebut pula Soeharto dinyatakan telah menggunakan Sjam Kamaruzzaman sebagai agennya untuk mencapai tujuannya yang ingin menyingkirkan petinggi-petinggi Angkatan Darat dan menaikkan kariernya bahkan sebagai orang nomor satu di Indonesia, melalui Sjam yang merencanakan "suatu Gerakan" yang semula diperintahkan oleh D.N. Aidit melindungi Soekarno dari "Dewan Djendral" dan malah dibelokan untuk kepentingan Soeharto.

Sjam tidak hanya menjadi agen bagi PKI yang telah D.N. Aidit jadikan sebagai ketua Biro Khusus dan agen bagi Soeharto pula yang mempunyai motif dendam terhadap petinggi AD. Tetapi Sjam juga menjadi Agen bagi pihak barat seperti Amerika dengan Central Intelligence Agency (CIA). Amerika merasa resah melihat perkembangan PKI di Indonesia. Sebagai "Macan Asia", berkuasanya komunis di Indonesia bisa menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika hal ini terjadi maka berarti kehancuran bagi Amerika sebagai negara liberalis yang tentu dari saingannya adalah negara komunis yaitu Uni Soviet. Keterkaitan Sjam dengan CIA adalah ia pernah mendapat pelatihan "khusus" dari partai sosialis Indonesia (PSI) yang nantinya akan terpecah dan salah satunya menjadi PKI. Pihak barat pernah memberikan dukungan pada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) tahun 1958 yang juga disponsori oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI) termasuk Masyumi, analisa Peter Dale Scott tentang:

The US and Indonesia Armies Mission
"...jutaan dolar yang sekitar tahun 1955-1956 oleh CIA telah dikucurkan kepada partai-partai. Masyumi dan PSI merupakan faktor yang berpengaruh dalam peristiwa 1965, dimana seorang bekas PSI-Sjam-diperkirakan sebagai *Mastermind* (otak/dalang) Gestapu." (Achadi, 2011: 43)

Tidak tertutup kemungkinan Sjam diperintahkan CIA mencari "orang dalam" melalui Biro Khusus PKI yang bertugas mencari simpatisan dari kalangan AD.

Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan antara dua negara adidaya ini dampaknya telah sampai kepada negara-negara lain termasuk Indonesia perbedaan paham dari keduanya telah menyebabkan kedudukan negara lain yang dianggap mendominasi negara-negara tetangganya menjadi perebutan demi bisa mewujudkan suatu negara masuk ke salah satu paham. Pihak Barat lain yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September adalah Inggris dengan agen rahasianya M16 dan Uni Soviet dengan KGB-nya.

Menurut Letkol Ali Said, SH., seorang Sjam tidak dapat disepelekan dia adalah seorang intel PKI yang telah masuk mengikuti PKI dari tahun 1949. Bahkan Sjam dapat disejajarkan

dengan D.N. Aidit. Sjam sangat cerdas dan penuh dengan perhitungan sekaligus pendiam.

Dari berbagai pendapat tentang siapa Sjam sebenarnya, kemisteriusan Sjam masih banyak yang belum terpecahkan dia disebut-sebut sebagai agen ganda dengan berbagai alasan yang dapat dikaitkan dengan fakta-fakta yang jelas. Sjam dalam kesaksiannya lebih menyudutkan partai dan membeberkan hal-hal yang tidak harus diketahui orang lain, alasannya karena ia merasa kecewa sebagai seorang yang disalahkan atas kegagalan Gerakan 30 September. Tetapi dari semua kemisteriusan Sjam, tidak dapat diabaikan bahwa ia adalah seorang komunis yang sejak 1943 telah mengikuti kelompok Pathuk yang jelas didalamnya dipelajari buku-buku mengenai komunisme. Mayjen TNI (purn) Tahir, seorang perwira pelaksana Teperpu berpendapat atau menilai bahwa Sjam kamruzzaman adalah orang yang memiliki disiplin yang hebat dan sangat taat pada pimpinan karena dilihat dari sikap tingkah laku dan tutur bahasanya. pada umumnya ia seperti manusia biasa yang kecerdasannya wajar-wajar saja dan bukan orang yang luar biasa.

PENUTUP

Simpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa latar belakang keterlibatan Sjam Kamaruzzaman dalam Gerakan 30 september 1965, adalah dari latar belakang pendidikannya yang berpindah-pindah tempat hingga akhirnya ia ke Yogyakarta. Disanalah terlihat Keterlibatan Sjam di dalam politik berhaluan kiri (komunis) di mulai sejak ia ikut kelompok Pathuk dan aktif dalam organisasi buruh dan petani. Kemudian pada tahun 1947 ia bertamu dengan Aidit dan menjadi asisten pribadinya hingga akhirnya resmi menjadi anggota dari partai PKI. Kepercayaan Aidit pada Sjam sangat besar dan kemudian dijadikannya Sjam sebagai ketua Biro Khusus suatu organisasi ilegal dibawah pimpinan Aidit langsung.

Adanya Biro Khusus adalah untuk melakukan Infiltrasi terhadap ABRI sebagai usaha strategi untuk melakukan kudeta dengan kekuatan militer. Meletusnya Gerakan 30 September tahun 1965 telah membuat peranan Sjam terlihat semakin jelas dengan ditunjuknya ia sebagai pimpinan pelaksana Gerakan,

alasannya karena ia tidak begitu dikenal dikalangan luas dan merupakan ketua Biro Khusus yang mengetahui informasi mengenai perwira-perwira tinggi ABRI. Akhir perjalanan Sjam adalah kariernya setelah kegagalan Gerakan 30 September berakhir di Mahmilub dan memberikan kesaksian-kesaksian mengenai kudeta tersebut. Hingga dari kesaksiannya menimbulkan pendapat bahwa ia seorang Agen Ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. M. DZ. 2014. *Benturan NU-PKI (1948-1965)*. Depok: Langgar Swadaya Nusantara.
- Aco. M. 2007. *TEPERPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para a pelakunya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Eros. Dj, dkk. 2006. *Siapa sebenarnya soeharto (fakta dan kesaksian para pelaku sejarah G 30 30 S/PKI)*. Jakarta: Media Kita
- Herman. D. S. 2013. *Kontroversi G 30 S*. Yogyakarta: Palapa
- Julius. P. 2013. *G 30 S, Fakta atau Rekayasa*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Marwati. Dj. P dan Nugroh. N. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mohammad. A. 2011. *Kabut G 30 S menguak peran CIA, M16, dan KGB*. Yogyakarta: Narasi
- Radias. B. 2013. *Tokoh-tokoh Gelap (yang terlupakan) dalam peristiwa G 30 S*. Yogyakarta: Palapa.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern (1200-2008)*. Jakarta: PT. Serambi ilmu Semesta.
- Samsudin. 2004. *Mengapa G 30 S/PKI Gagal? (suatu analisis)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sekretariat Negara RI. 1994. *Gerakan 30 September pemberontakan partai komunis Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Peter. E. 2015. *Komuns Ala Aidit (kisah partai komunis dibawah pimpinan D.N Aidit)*. Jakarta: PT Buku Seru.